

**MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
TANTANGAN, INKLUSI, DAN DAMPAK PADA DEMOKRASI
PEMILU 2019 DI INDONESIA**

DOSEN PENGAMPU : Ni Nyoman Ayu J. Sastaparamitha, S.S., M.Pd.



Disusun oleh:

1. Rezi Sandani (21101041)
2. Ni Komang Intran Vidya Rahmadar (20101239)

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
INSITUT BISNIS DAN TEKNOLOGI INDONESIA
DENPASAR 2023**

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat-Nya kelompok kami dapat menyelesaikan sebuah tugas makalah Pendidikan Kewarganegaraan dengan judul “Tantangan, Inklusi, Dan Dampak Pada Demokrasi Pemilu 2019 di Indonesia” dapat diselesaikan dengan lancar. Pemilu adalah momen penting dalam kehidupan demokrasi suatu negara, dan di Indonesia, Pemilu 2019 merupakan salah satu tonggak bersejarah yang penuh tantangan, harapan, dan dampak yang mendalam. Dalam rangka menjalankan tugas akademik, kami merangkum berbagai aspek yang terkait dengan Pemilu 2019 di Indonesia, sesuai dengan panduan yang telah disampaikan.

Makalah ini akan membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan Pemilu 2019, termasuk analisis respons masyarakat online terhadap debat pertama, pengalaman menarik selama sidang sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, serta elemen-elemen penting lain yang membentuk narasi demokrasi di Indonesia pada saat itu. Selain itu, kami juga akan mengulas inisiatif yang patut diperhatikan, seperti upaya inklusi pemilih penyandang disabilitas mental yang diinisiasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kami juga akan membahas alur waktu penghitungan suara, pelaksanaan pemilu yang tertib dan damai, serta partisipasi masyarakat yang memiliki gangguan jiwa. dan juga akan menyoroti angka golput yang mencapai level terendah sejak 2004 dan usaha keras masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka. Makalah ini juga akan membahas perspektif pemantau asing terhadap pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia, serta peristiwa unik yang terjadi di beberapa tempat pemungutan suara, termasuk TPS bertema superhero.

Harapan kami semoga makalah ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana demokrasi berkembang dan dijalankan dalam konteks Indonesia serta bisa membantu merancang pemilu yang lebih inklusif, adil, dan sukses di masa yang akan datang. Dalam pembuatan makalah ini mungkin banyak kekurangan – kekurangan yang ditemukan. Oleh karena itu, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Denpasar, 07 November 2023

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
BAB I	5
PENDAHULUAN.....	5
BAB II.....	6
PEMBAHASAN	6
2.1 Respons <i>Positif</i> dan <i>Negatif</i> Warganet Saat Debat Pertama Versi <i>PoliticaWave</i>	6
2.2 Hal Menarik Selama Sidang Sengketa Hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).....	7
1. MK diminta diskualifikasi Jokowi-Ma'ruf dan nyatakan Prabowo-Sandi menang	7
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) nilai permohonan Prabowo-Sandi tidak jelas.....	8
3. Tim hukum Jokowi-Ma'ruf sebut kubu Prabowo-Sandi tak punya bukti.....	8
4. KPU dan tim hukum 01 tolak perbaikan permohonan sengketa kubu 02	9
5. Saksi dan ahli pemohon, termohon, dan pihak terkait.....	9
2.3 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Akan Masukkan Pemilih Penyandang Disabilitas Mental ke DPT Pemilu 2019	10
2.4 Begini Alur Waktu Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilu 2019.....	11
2.5 Pelaksanaan Pemilu 2019 Berjalan Tertib Dan Damai Di Lapas Narkotika Jakarta.....	12
2.6 Pesta Demokrasi yang Sama bagi Mereka dengan Gangguan Jiwa	14
2.7 Lembaga survei: Jumlah golput di Pilpres 2019 paling rendah sejak 2004	18
1. Suara kelompok minoritas	18
2. Angka golput di pileg lebih besar	19
3. Di hadapan kampanye golput	19
2.8 Mereka yang berjuang untuk bisa mencoblos saat pemilu: 'Memilih adalah hak istimewa'	21
2.9 Kata Pemantau Asing soal Pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia	23
2.10 Pemilu 2019, Ini 5 Hal Unik yang Ada di Sejumlah TPS di Indonesia, Termasuk TPS Bertema Superhero	24
1. TPS Mewah mirip Resepsi Pernikahan.....	24
2. TPS tempat Joko Widodo Mencoblos Dihiasi Ondel-ondel.....	25
3. TPS Sandiaga Uno Bernuansa Wayang.	25
4. Penghitungan Surat Suara Dipindah ke Mushala Akibat Hujan Deras.....	26
5. TPS Bertema Superhero di Surabaya.	27
BAB III	28
PENUTUP.....	28

3.1 Kesimpulan.....	28
1. Inklusi Pemilih Penyandang Disabilitas Mental	28
2. Respon Warganet.....	28
3. Alur Penghitungan.....	28
4. Partisipasi Masyarakat dengan Gangguan Jiwa	28
5. Jumlah Golput yang Rendah	28
6. Peran Pemantau Asing	28
7. Uniknya Pemilu 2019	28
3.2 Saran	29
1. Inklusi Pemilih Penyandang Disabilitas Mental	29
2. Manajemen Media Sosial.....	29
3. Transparansi Alur Penghitungan Suara	29
4. Akses untuk Masyarakat dengan Gangguan Jiwa	29
5. Pendidikan Pemilih.....	29
6. Kerja Sama Internasional	29
7. Kreativitas dan Partisipasi Aktif.....	29
DAFTAR PUSTAKA	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi adalah fondasi bagi tatanan politik yang inklusif dan berkelanjutan dalam suatu negara. Dalam sistem demokrasi, pemilihan umum merupakan pilar utama dalam mengekspresikan kehendak dan aspirasi rakyat. Pemilihan umum memberikan warga negara hak untuk memilih pemimpin mereka, dan di Indonesia, Pemilu 2019 adalah salah satu momen penting yang mencerminkan komitmen negara ini terhadap demokrasi.

Pemilu 2019 di Indonesia telah menjadi peristiwa yang penuh tantangan, harapan, dan dampak yang mendalam. Ini adalah momen yang mencakup respons positif dan negatif warganet terhadap debat pertama para kandidat, perjalanan menarik selama sidang sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), serta berbagai elemen yang membentuk proses demokrasi yang dinamis.

Salah satu aspek yang menarik adalah upaya inklusi pemilih penyandang disabilitas mental yang diinisiasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Alur waktu penghitungan suara, pelaksanaan pemilu yang tertib dan damai, serta partisipasi masyarakat yang memiliki gangguan jiwa adalah hal lain yang mencirikan pemilu ini. Terlebih lagi, angka golput yang mencapai level terendah sejak 2004 menggambarkan semangat masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka, sementara perjuangan mereka yang berjuang untuk bisa mencoblos saat pemilu menunjukkan bahwa memilih adalah hak istimewa yang bernilai.

Selain itu, pandangan dan analisis pemantau asing terhadap pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia memberikan perspektif global yang berharga terhadap proses demokrasi di negara ini. Dan, tentu saja, makalah ini akan membawa kita melihat keunikan yang ada di sejumlah tempat pemungutan suara, termasuk TPS bertema superhero yang menjadi daya tarik tersendiri.

Makalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang berbagai aspek penting yang mempengaruhi Pemilu 2019 di Indonesia, serta dampaknya terhadap sistem demokrasi negara ini. Kami akan mengulas dan menganalisis artikel-artikel yang relevan dengan fokus pada hal-hal unik, positif, dan inspiratif dalam konteks pesta demokrasi tersebut.

Selain itu, penulis akan mengeksplorasi hubungan artikel-artikel tersebut dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ini akan membantu saya dalam menyajikan ulasan yang lebih dalam dan relevan tentang isu-isu yang muncul selama pemilu. Makalah ini akan menyajikan kesimpulan yang mencakup semua artikel yang telah kami ulas. Kami akan mengaitkan temuan dan hasil analisis kami untuk memberikan pandangan yang komprehensif tentang Pemilu 2019 di Indonesia. Selain itu, penulis juga akan menyusun saran-saran yang dapat menjadi landasan untuk memastikan bahwa pesta demokrasi di tahun-tahun mendatang akan semakin meriah, unik, dan tidak menimbulkan perpecahan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Respons *Positif* dan *Negatif* Warganet Saat Debat Pertama Versi *PoliticaWave*



Beberapa pernyataan yang dilontarkan atau tindakan dalam debat pertama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Kamis (17/1/2019) malam, mengundang respons *positif* dan *negatif* di media sosial. *PoliticaWave* merekam seluruh percakapan warganet di media sosial dan menemukan beberapa hal yang mendapatkan respons *positif* dan *negatif* tertinggi bagi masing-masing pasangan calon. Dari total percakapan warganet tentang paslon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, presentase percakapan *positif* tentang mereka sebesar 82 persen dan bernada negatif sebesar 18 persen. Pendiri *PoliticaWave* Yose Rizal menuturkan, Jokowi-Ma'ruf mendapatkan percakapan *positif* terbesar saat Jokowi meminta Prabowo tidak menuduh aparat penegak hukum yang terbang pilih. "Jokowi-Ma'ruf meraih percakapan *positif* terbesar di segmen 2.

Hal ini dikarenakan pernyataan Jokowi terhadap Prabowo untuk tidak menuduh atau menyebarkan hoaks yang dimana berhasil menarik perhatian netizen," kata Yose melalui keterangan tertulis, Jumat (18/1/2019). Sementara itu, Jokowi-Ma'ruf mendapat percakapan *negatif* tertinggi karena Jokowi dinilai tidak memberi kesempatan kepada cawapresnya untuk berbicara dan panjangnya pemaparan visi misi oleh Jokowi. Di sisi lain, presentase percakapan bernada *positif* yang didapatkan paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yaitu 76 persen dan sisanya sebesar 14 persen bernada *negatif*. Menurut pantauan *PoliticaWave* di media sosial, kritikan Prabowo terhadap perbedaan kebijakan antar menteri pemerintahan Jokowi mendapatkan percakapan *positif* tertinggi. "Sedangkan, Prabowo meraih percakapan

positif terbesar di segmen 5 dikarenakan kritiknya terhadap kebijakan impor yang berbeda antarmenteri-menteri Jokowi," teranginya. Lalu, percakapan bernada *negatif* terbesar didapatkan paslon nomor urut 02 karena hanya menjanjikan kenaikan gaji kepada PNS, serta kasus hoaks Ratna Sarumpaet yang kembali disinggung.

2.2 Hal Menarik Selama Sidang Sengketa Hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK)



Mahkamah Konsititusi (MK) telah selesai melakukan pemeriksaan perkara hasil pilpres 2019 yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sidang digelar sebanyak enam kali, dimulai pada Jumat (14/6/2019) hingga Jumat (21/6/2019). Prabowo-Sandi menggugat hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memenangkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Selama persidangan pemeriksaan perkara, ada sejumlah hal yang menarik. Berikut rangkumannya:

1. MK diminta diskualifikasi Jokowi-Ma'ruf dan nyatakan Prabowo-Sandi menang

Tim hukum Prabowo-Sandiaga meminta MK mendiskualifikasi pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai peserta pemilu 2019. Sebab, mereka menilai, paslon nomor urut 01 itu telah melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Mereka juga meminta MK menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 02 sebagai pemenang pilpres atau paling tidak pemungutan suara diulang secara nasional. Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto menuduh, Presiden Jokowi sebagai petahana setidaknya melakukan lima bentuk kecurangan selama pilpres 2019. Kelima tuduhan kecurangan itu adalah penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan Program Kerja Pemerintah, Penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, ketidaknetralan Aparatur Negara, polisi dan intelijen, pembatasan kebebasan pers dan diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakkan hukum. Bambang

mengklaim, kelima jenis pelanggaran dan kecurangan itu bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. "Dalam arti dilakukan oleh aparat struktural, terencana, mencakup dan berdampak luas kepada banyak wilayah Indonesia," kata Bambang. Selain hal-hal tersebut, Tim Hukum Prabowo-Sandi juga menyoal hal lainnya dalam pokok permohonan. Misalnya, menuding adanya kekacauan Situng milik KPU hingga menuding adanya daftar pemilih tetap (DPT) yang invalid.

2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) nilai permohonan Prabowo-Sandi tidak jelas

KPU menyebut, permohonan sengketa pilpres yang diajukan Prabowo-Sandi tidak jelas atau kabur. Hal ini tercantum dalam berkas jawaban yang diserahkan KPU ke MK untuk menjawab gugatan Prabowo-Sandi. "Jelas terbukti bahwa permohonan pemohon tidak jelas (obscure libel), sehingga karenanya menurut hukum permohonan pemohon a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima," demikian dikutip dari berkas permohonan.

Gugatan yang tidak jelas itu, misalnya, soal dalil adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang diduga dilakukan oleh pihak terkait dalam hal ini paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf. Menurut KPU, kubu Prabowo tidak menguraikan secara jelas kapan, di mana, dan bagaimana pelanggaran dilakukan atau siapa melakukan apa, kapan, di mana dan bagaimana cara melakukannya.

Dalam berkas permohonan, KPU menyebut bahwa semuanya serba tidak jelas, dan menyulitkan pihaknya untuk memberikan tanggapan atas dalil-dalil pemohon a quo. Dalil permohonan kubu Prabowo soal 17,5 juta DPT tak masuk akal juga dinilai KPU kabur. Sebab, pemohon tidak menjelaskan siapa saja mereka, bagaimana faktanya yang dimaksud DPT tidak masuk akal, dari daerah mana saja mereka, dan apakah mereka menggunakan hak pilih di TPS mana saja dan kepada siapa mereka menentukan pilihannya serta kerugian apa yang diderita pemohon. Soal tuduhan pemilih usia kurang dari 17 tahun sebanyak 20.475 orang pun dianggap tak jelas.

Sebab, pemohon tidak menyebutkan siapa mereka, apakah mereka menggunakan hak pilihnya atau tidak, di TPS mana mereka menggunakan hak pilihnya, dan kepada siapa mereka menentukan pilihannya. Begitupun, tuduhan mengenai pemilih berusia lebih dari 90 tahun, banyaknya pemilih dalam satu Kartu Keluarga (KK), DPT invalid dan DPT ganda, Situng, hingga tuduhan penghilangan C7 atau daftar hadir pemilih di TPS, seluruhnya dinilai tidak jelas.

3. Tim hukum Jokowi-Ma'ruf sebut kubu Prabowo-Sandi tak punya bukti

Tim hukum pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf menyinggung politik pascakebenaran (post truth) ketika menanggapi gugatan Prabowo-Sandiaga dalam sidang sengketa pilpres 2019 di MK. Mereka meminta MK untuk mengkritisi gugatan 02 yang dinilai menggunakan strategi post truth itu. "Pihak terkait memandang sangat penting untuk memilah dan mengkritisi bangunan narasi yang dijadikan dalil-dalil permohonan pemohon," ujar Ketua tim hukum 01, Yusril Ihza Mahendra dalam sidang lanjutan sengketa pilpres, di Gedung MK, Selasa (18/6/2019). Tim hukum 01 melihat narasi kecurangan diulang terus menerus tanpa ada bukti yang sah. Klaim kemenangan juga dilakukan tanpa menunjukkan proses penghitungan yang valid. Tim hukum 01 tidak ingin sengketa pilpres ditangani berdasarkan tuduhan-

tuduhan tidak berdasar seperti itu. Mereka berharap, tim hukum 02 memberikan bukti berdasarkan fakta atas tuduhan-tuduhan dalam gugatan itu.

4. KPU dan tim hukum 01 tolak perbaikan permohonan sengketa kubu 02

Pengacara KPU dan tim hukum Jokowi-Ma'ruf menilai permohonan gugatan Prabowo-Sandiaga yang diajukan pada 10 Juni 2019 bukan perbaikan, melainkan permohonan baru. Pengacara KPU Ali Nurdin mengatakan, perbaikan permohonan memiliki perbedaan yang mendasar dari permohonan yang pertama.

"Perbaikan permohonan pemohon memiliki perbedaan mendasar baik posita maupun petitumnya maka bisa disimpulkan sebagai permohonan baru," ujar Ali dalam sidang lanjutan sengketa pilpres, di Gedung MK, Selasa (18/6/2019).

Sementara itu, ketua tim hukum 01 Yusril Ihza Mahendra mengatakan, perbaikan permohonan gugatan 02 bertambah lima kali lipat. Pada permohonan yang diterima tanggal 24 Mei, jumlahnya hanya 37 halaman. Namun, dalam perubahan permohonan, jumlahnya bertambah menjadi 146 halaman.

Oleh karena itu, baik Yusril maupun Ali Nurdin sama-sama menolak permohonan gugatan yang baru itu.

Alasannya, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tidak mengatur perbaikan permohonan untuk sengketa pilpres.

"Pengajuan perbaikan permohonan yang dilakukan oleh pemohon tidak dapat dibenarkan secara hukum dan karenanya patut untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah," ujar Yusril.

5. Saksi dan ahli pemohon, termohon, dan pihak terkait

Sidang yang digelar MK pada Rabu (19/6/2019) diagendakan untuk pemeriksaan saksi dan ahli dari pihak pemohon. Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menghadirkan 14 saksi dan 2 orang ahli.

Saksi dan ahli yang dihadirkan banyak menyoal tentang temuan pemilih dalam DPT yang invalid, jumlah TPS yang dianggap bermasalah, hingga tuduhan kecacauan Situng milik KPU. Sementara KPU sama sekali tak menghadirkan saksi dan hanya menghadirkan seorang ahli dalam persidangan yang digelar Kamis (20/6/2019).

KPU menghadirkan pakar IT yang banyak menjelaskan soal mekanisme input data dalam Situng. Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menyebut, saksi yang dihadirkan oleh Tim Hukum paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi tidak cukup meyakinkan untuk memperkuat argumen permohonan. Oleh karenanya, KPU tak perlu repot-repot menghadirkan saksi, tetapi hanya menghadirkan ahli. "Dalam perkembangannya kan orang-orang yang dihadirkan sebagai saksi oleh pemohon dalam pandangan KPU kan tidak cukup meyakinkan untuk memperkuat argumentasi permohonan," kata Hasyim di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2019). "Kalau seperti itu KPU mencukupkan diri untuk menghadirkan bukti berupa keterangan ahli," sambungnya. Sementara itu, dalam sidang lanjutan yang digelar Jumat (21/6/2019), Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf hadirkan dua orang saksi dan dua orang ahli. Dua orang saksi memberikan keterangan tentang sejumlah agenda Tim Kampanye Nasional (TKN)

Jokowi-Ma'ruf selama masa kampanye. Sedangkan dua ahli bicara soal makna pelanggaran pemilu terstruktur, masif, dan sistematis (TSM). 6. Suasana hangat jelang penutupan sidang MK Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman bersiap untuk menutup sidang sengketa hasil Pilpres 2019, di Gedung MK, Jakarta, Jumat (21/6/2019).

Ketika itu, Ketua tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto menginterupsi dan meminta waktu 1 menit kepada Majelis Hakim untuk membacakan ayat Alquran surat An-Nisa 135.

Surat itu memaknai keadilan. "An-Nisa 135 yang dipajang di depan MK adalah salah satu surat yang menjelaskan ingin sekali mewujudkan keadilan. Untuk itu, untuk merahmati, memberkati majelis ini, saya cuma minta waktu satu menit, ada teman saya yang akan menyampaikan," tutur Bambang. Lantas, anggota tim hukum Prabowo-Sandiaga, Zulfadli membacakan ayat tersebut beserta artinya. Ketua MK Anwar Usman kemudian mempersilakan KPU sebagai termohon dan kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pihak terkait serta Bawaslu untuk membacakan pernyataan penutup. "Agar adil," kata Anwar. Dalam pernyataannya, Ketua KPU Arief Budiman mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan pemilu. Arief berharap, persidangan di MK bisa mewujudkan harapan seluruh masyarakat Indonesia. "Dan kita percayakan sepenuhnya kepada Yang Mulia hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya," kata Arief. Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra berharap, surat An-Nisa 135 yang dibacakan kubu 02 bisa jadi pedoman bagi Majelis Hakim dalam membuat putusan. "Ayat itu juga kami kutip dalam halaman-halaman pertama dalam jawaban kami sebagai pihak terkait," kata Yusril. Yusril mengatakan, persidangan di MK berjalan secara jujur dan adil. Dia percaya, Majelis akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Sebelum menutup rangkaian sidang, Anwar Usman juga mengutip surat Annisa ayat 58. Anwar mengatakan, sebagai hakim, dia akan berpegang teguh pada ayat tersebut.

2.3 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Akan Masukkan Pemilih Penyandang Disabilitas Mental ke DPT Pemilu 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana untuk memasukkan pemilih penyandang disabilitas mental ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Langkah tersebut, berdasar rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan sejumlah masyarakat sipil.

"Kemarin kami menerima rekomendasi dari Bawaslu RI agar pemilih disabilitas mental atau tunagrahita itu dimasukkan," kata Komisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/11/2018).

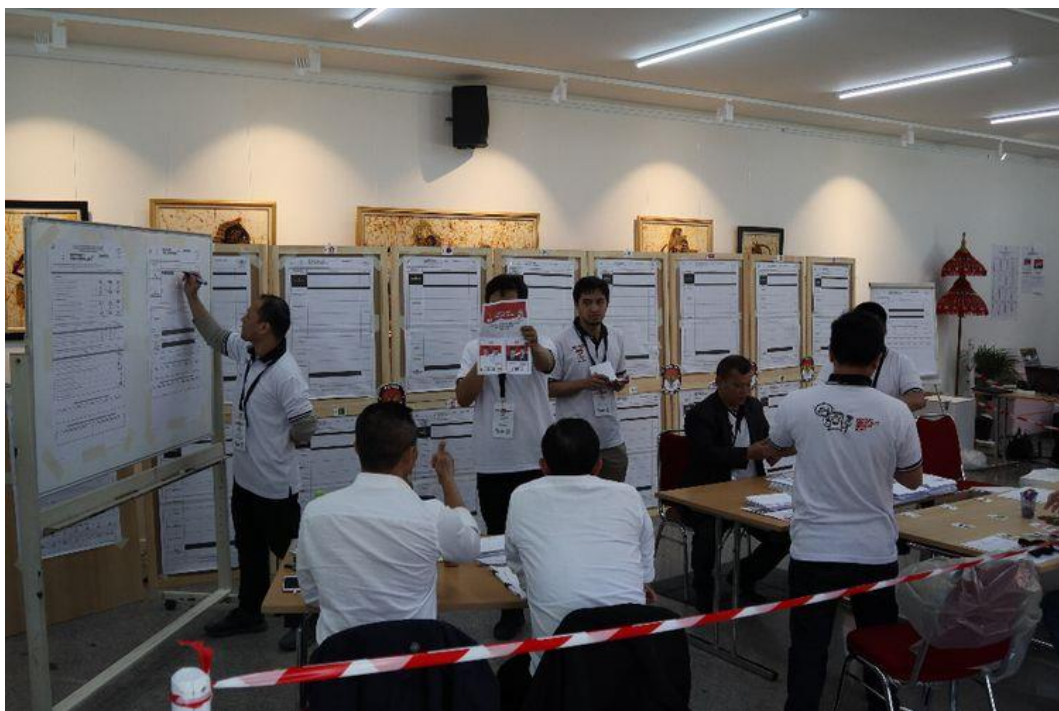
Viryan mengatakan, dalam Pilkada 2018, penyandang disabilitas mental masih kesulitan untuk mendapatkan hak pilihnya. Sebab, berdasar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XIII/2015 soal hak pilih disabilitas mental, disebutkan

bahwa, hanya penderita gangguan jiwa yang dinilai mampu menggunakan hak pilihnya yang bisa ikut dalam pemungutan suara di Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Sementara itu, jika berdasar surat keterangan dokter pemilih penyandang disabilitas mental dinyatakan terganggu jiwanya, maka pemilih itu tidak dimasukkan dalam DPT. Padahal, dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tidak disebutkan bahwa pemilih penyandang disabilitas mental tidak bisa dimasukkan dalam DPT.

"Masukan dari masyarakat sipil meminta agar hal tersebut dihapus karena menurut mereka disabilitas mental itu bersifat temporal namun kemudian terakhir ada surat rekomendasi dari Bawaslu. Nah kalau surat rekomendasi dari Bawaslu kita tindak lanjuti," ujar Viryan. Namun demikian, nantinya, tetap akan dilakukan pendampingan terhadap pemilih penyandang disabilitas mental saat hari pemungutan suara.

2.4 Begini Alur Waktu Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilu 2019



Pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019 telah usai. Proses ini akan dilanjutkan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Rekapitulasi dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan, berlanjut ke kabupaten, provinsi, hingga ke nasional.

Proses rekapitulasi secara berjenjang dilakukan selama 18 April-22 Mei 2019. "Setelah pemungutan suara kemarin, maka mulai hari ini, tanggal 18 April 2019 itu sudah memasuki tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019). Tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara tertuang dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Proses ini berangkat dari tingkat TPS. Penghitungan suara dilakukan sejak TPS ditutup dan selambat-lambatnya selesai pada Kamis (18/4/2019) pukul 12.00 waktu setempat. Selanjutnya, berita acara, hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan dari TPS diserahkan ke Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK). Proses ini dilakukan dalam kurun waktu 17-18 April 2019.

2.5 Pelaksanaan Pemilu 2019 Berjalan Tertib Dan Damai Di Lapas Narkotika Jakarta



Jajaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Klas IIA Jakarta Rabu,(17/04) melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 di Lapangan Hijau Gedung III Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta yang dimulai serentak pada pukul 08.00 s.d 13.00 wib. Antrean langsung terlihat ketika Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibuka di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Klas IIA Jakarta.

Kegiatan Pemilu dilaksanakan oleh Jajaran Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta yang ditunjuk langsung oleh Kepala Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta sebagai Panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dibentuk menjadi 6 Kelompok untuk 6 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdiri dari 7 personil Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan 2 Pengamanan Langsung (Pamsung) dari setiap TPS nya.

Sebelum kegiatan pemungutan suara berlangsung, Jajaran Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta yang juga sebagai PPS berkumpul di Lapangan Hijau Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta untuk melaksanakan Apel Pagi bersama yang dipimpin langsung oleh Soeistanto selaku Kepala Seksi Binadik Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta.

Soeistanto menyampaikan dalam sambutan Apel Pagi “Mohon kepada Panitia Pemungutan Suara yang telah ditunjuk mampu melaksanakan tugasnya dengan Profesional dan aktif mengajak WBP dengan Persuasif agar semua WBP bersedia memberikan hak suaranya dalam Pemilihan Umum 2019 ini.” “Mari kita berdo’a

semoga kegiatan Pelaksanaan Pemilu berjalan baik, aman dan tertib,aamiin, ucap Soeistanto.

Sri Puguh Utami selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Lilik Sujandi selaku Direktur Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Bambang Soemardiono sebagai Kepala Kantor Wilayah dan R. Andhika Prasetya sebagai Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta turut hadir untuk mengontrol serta meninjau langsung proses pelaksanaan kegiatan Pemilu 2019 di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta.

Imam Badrutammam sebagai Kepala Subsidi Registrasi Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta sekaligus Koordinator Kegiatan Pelaksanaan Pemilu 2019 di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta menyampaikan kepada Tim Humas “ Alhamdulillah proses pelaksanaan Pemilu di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta berjalan aman dan lancar, tidak ada permasalahan ketika memulai pemungutan suara dan penghitungan suara intinya secara keseluruhan Pelaksanaan Pemilu 2019 di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta sudah berjalan tertib dan damai.”

Imam pun menjelaskan kepada Tim Humas “Bahwa Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-red) seluruhnya untuk WBP di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta sebanyak 1835, namun Data Aktif yang artinya WBP masih berada di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta hanya 1264 WBP tetapi yang menggunakan hak suaranya berjumlah 1140 WBP yang tidak menggunakan hak suaranya berjumlah 124 WBP sedangkan Data yang sudah tidak aktif lagi dengan alasan WBP sudah mutasi atau dipindahkan sebanyak 481 WBP dan 100 WBP sudah selesai menjalani masa pidana atau bebas dari Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta.”

Meskipun cuaca sangat terik, namun tidak menjadikan Petugas KPPS Pemilu 2019 dan WBP di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta tak bersemangat ikut mensukseskan justru nampak terlihat semua yang berada di TPS dengan sabar menunggu antrian untuk melaksanakan proses pemungutan suara sesuai prosedur yang harus dilalui.

2.6 Pesta Demokrasi yang Sama bagi Mereka dengan Gangguan Jiwa



Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) seutuhnya merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak yang sama dengan setiap warga negara lainnya, termasuk dalam memilih pada pesta demokrasi 17 April 2019. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Termasuk penderita gangguan jiwa yang juga memiliki hak setara sebagai warga negara, khususnya untuk berpartisipasi dalam pemilu. Sebagian orang menyetujui dan mendukung mengenai pemenuhan hak pilih bagi ODGJ. Namun, tidak sedikit juga kelompok masyarakat dan bahkan tokoh serta partai politik yang menolak bahwa penderita penyakit mental atau orang dengan gangguan jiwa diberikan hak untuk memilih dalam Pemilu 2019.

Orang dengan gangguan jiwa, yang sebagian orang awam menyebutnya dengan sebutan kasar "orang gila", sesungguhnya telah dijamin haknya dalam memilih sudah sangat lama, yakni sejak 1955.

Berbagai regulasi yang mengatur tentang kesetaraan hak setiap warga negara, termasuk ODGJ terdapat di berbagai undang-undang, pengesahan konvensi, hingga putusan Mahkamah Konstitusi. Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia menyebutkan dasar-dasar regulasi yang mengatur tentang ketentuan pemenuhan hak pilih bagi ODGJ antara lain Undang-Undang Pemilu, UUD 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Kemudian, Undang-Undang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Penyandang Disabilitas, dan yang terbaru Surat Edaran KPU RI Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tentang Pendaftaran Pemilih Bagi Penyandang Disabilitas Grahita/Mental. Penyandang disabilitas mental atau orang yang terganggu kesehatan jiwanya pernah dilarang untuk memilih dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal 57 ayat 3 huruf a UU tersebut berbunyi, "Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya." Sejumlah aktivis melayangkan uji materi terhadap pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai bisa menghilangkan hak pilih bagi para ODGJ. Kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 135/PUU-XII/2015 yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut telah menyalahi UUD 1945.

Indonesia bukanlah negara pertama dan satu-satunya yang menghormati dan memfasilitasi hak suara yang dimiliki oleh orang dengan gangguan jiwa. Hampir semua negara tidak melarang orang dengan gangguan jiwa untuk ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Stigma masyarakat ODGJ bukan hanya soal hilang akal seperti yang kebanyakan orang awam pikirkan. Gangguan jiwa merupakan penyakit yang bisa disembuhkan.

Stres berat, depresi, perilaku seks menyimpang juga termasuk dalam gangguan kesehatan jiwa yang bisa diobati. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia DKI Jakarta dr Nova Riyanti Yusuf Sp.KJ menjelaskan, penyakit gangguan jiwa terbagi menjadi dua, yakni gangguan neurotik dan gangguan psikotik.

Penderita gangguan jiwa psikotik telah kehilangan rasa kenyataan dan tidak bisa membedakan antara realita dan halusinasinya. Gangguan jiwa ini bisa menimbulkan waham, halusinasi, dan kekacauan perilaku. Contoh gangguan jiwa psikotik seperti skizofrenia, demensia, gangguan waham dan gangguan suasana hati yang berubah-ubah. Sementara gangguan jiwa neurotik seperti depresi, stres, penyimpangan perilaku seksual, bipolar, gangguan kepribadian, gangguan kecemasan, dan lainnya yang penderitanya tidak bermasalah dengan perbedaan halusinasi dan kenyataannya.

Gangguan jiwa neurotik maupun psikotik juga memiliki kategori dari ringan hingga berat yang memengaruhi kondisi fisik dan psikis penderitanya. Namun sekali lagi, jika penyakit kesehatan jiwa ditangani dengan baik, dapat disembuhkan sehingga membuat penderitanya bisa kembali menjalani fungsi kesehariannya atau bahkan memiliki pekerjaan.

Pasien gangguan jiwa yang sudah mendapatkan penanganan dari psikiater akan diberikan penilaian dari dokter bahwa ODGJ tersebut dalam kondisi yang baik dan bahkan bisa menjalani rawat jalan.

Jangan membayangkan pasien gangguan jiwa yang dirawat di rumah sakit jiwa menetap di sana dalam waktu yang lama, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun.

Pasien gangguan jiwa sama halnya seperti pasien dengan gangguan kesehatan fisik, yaitu dirawat dan diobati secara intensif di rumah sakit dan diperbolehkan pulang jika dinilai kondisi kesehatannya mulai membaik. Riyanti mengatakan, pasien gangguan jiwa disebut dalam kondisi yang stabil apabila dia bisa menjalani fungsi kesehariannya seperti merawat diri secara mandiri, tahu waktu untuk makan, mengerti harus minum obat, dan sebagainya. Pada saat kondisi inilah ODGJ dikatakan bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019.

Sedangkan untuk ODGJ yang berada dalam kondisi akut, Riyanti mempercayai bahwa dengan sendirinya dia tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Pada saat hari pemungutan suara tidak akan menggunakan hak pilihnya dikarenakan kondisinya yang tidak stabil. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia Yeni Rosa Damayanti menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi pemilu kepada pemilih ODGJ agar penggunaan hak suara dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia bersama organisasi lainnya beberapa kali bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan sosialisasi dan memberikan pendidikan pemilu bagi pemilih ODGJ. Menurut Yeni, sebagian besar ODGJ memiliki minat dalam edukasi pemilu dan berkeinginan untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan nanti. Kendati demikian, ada pula ODGJ yang tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Dari penyelenggaraan Pemilu 2014 yang telah diikuti oleh pemilih ODGJ di beberapa tempat di Indonesia, Yeni menyebutkan tidak ada satu pun yang bermasalah dan seluruhnya berjalan lancar. Beberapa hasil penghitungan suara di beberapa TPS yang digelar di rumah sakit atau panti pun berbeda-beda satu sama lain. Hanya saja, Yeni berharap agar lebih banyak lagi ODGJ yang diberikan kesempatan untuk memilih dalam pesta demokrasi lima tahunan ini. "Belum semua rumah sakit atau panti mengizinkan pasiennya untuk memilih dalam pemilu," ujarnya. Fasilitas pemungutan suara Rumah Sakit Dr H Marzoeki Mahdi Bogor adalah salah satu fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pemilu pada 2014 dan akan menyelenggarakannya kembali pada Pemilu 17 April mendatang. Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Marzoeki Mahdi Bogor Bambang Eko Sunaryanto menyebut hak asasi manusia menjadi alasan pihaknya mengizinkan pemilu untuk pemilih ODGJ dilakukan lingkungan rumah sakit tersebut. "Karena sesuai dengan hak asasi manusia, bahwa setiap warga dijamin hak politiknya. Kecuali apabila ada kendala-kendala atau kekuatan yang tidak memungkinkan untuk menggunakan hak pilihnya, atau secara administrasi menjadi kendala," kata Bambang. Rencananya, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Bogor Barat akan membuat Tempat Pemungutan Suara (TPS) di ruang Instalasi Rehabilitasi Psikososial Rumah Sakit Dr H Marzoeki Mahdi untuk pemungutan suara bagi ODGJ.

Dari sekitar 300 lebih pasien ODGJ yang ada di rumah sakit ini, hanya pasien dalam kondisi stabil dan tenang saat hari pemungutan suara saja yang nantinya akan menggunakan hak pilih. Di rumah sakit peninggalan Hindia Belanda yang berdiri sejak 1882 ini pasien dibagi dalam dua kategori. Bagi yang akut serta gaduh gelisah ditempatkan di Ruang Rawat Psikiatri Akut (PHCU).

Sedangkan bagi yang kondisinya sudah stabil serta tenang ditempatkan di ruang rawat inap berupa bangsal-bangsal. PHCU di rumah sakit jiwa ibarat ICU di rumah sakit umum untuk penyakit fisik. Kondisi pasien yang berada di fasilitas ini seringkali gaduh, marah-marah, berteriak, dan kondisi lainnya yang tidak terkontrol. Sementara pasien Yang ditempatkan di bangsal dan ruang rawat inap yang berasitektur kental gaya kolonial, lebih pendiam dan tenang. Para pasien tersebut tampak murung, berdiam diri, seperti orang tua kesepian yang ditinggalkan anak-anaknya.

Beberapa pasien sibuk berinteraksi dengan perawat membicarakan masalah-masalah terkait kesehatan gangguan jiwa yang dialami. Mereka mengerti ketika diajak mengobrol dan paham apa-apa yang disampaikan seseorang kepadanya, termasuk ketika perawat mensosialisasikan akan ada pemilihan umum yang dilaksanakan di rumah sakit. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) dr Eka Viora Sp.KJ menganggap kekhawatiran orang dengan gangguan jiwa akan membahayakan pemilih lain di TPS sangat tidak beralasan, mengingat tingkat keberbahayaan ODGJ sama dengan masyarakat lain pada umumnya. Bahkan saat ini lebih banyak ODGJ yang menjadi korban kekerasan. PSDKJI mengimbau kepada para psikiater dan masyarakat untuk menaati peraturan perundangan yang berlaku di negara Indonesia untuk memfasilitasi penyampaian hak suara orang dengan gangguan jiwa serta menghormati dan menjamin hak pilih ODGJ. "Memberikan hak pilih pada orang dengan gangguan jiwa merupakan bagian penting dalam upaya mengurangi stigma, mendorong rehabilitasi dan integrasi orang dengan gangguan jiwa agar dapat diterima dan aktif kembali dalam kehidupan bermasyarakat," kata Eka. Gangguan jiwa bukanlah ketidakmampuan. Penetapan kapasitas orang dengan gangguan jiwa untuk menggunakan hak pilihnya tidak didasarkan pada diagnosis maupun gejalanya, melainkan didasarkan pada kapasitasnya untuk memahami tujuan pemilu, alasan berpartisipasi, dan pemilihan calon. Pertimbangan mendalam ODGJ untuk memilih terutama dikaitkan dengan fungsi kognitif atau kemampuan berpikir, mengendalikan agresivitas, dan berperilaku sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Komisi Pemilihan Umum sudah mengumumkan bahwa semua penyandang disabilitas termasuk disabilitas mental memiliki hak suara dalam pencoblosan 17 April 2019. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 ada lebih dari 500.000 ODGJ di Indonesia. Sebanyak 3.500 orang di antaranya terdaftar dalam daftar pemilih dan akan terlibat dalam pesta demokrasi Indonesia 2019.

2.7 Lembaga survei: Jumlah golput di Pilpres 2019 paling rendah sejak 2004



Jumlah mereka yang tidak menggunakan hak pilih atau golput di Pilpres 2019 paling rendah sejak Pilpres tahun 2004, menurut Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA. Berdasarkan hitung cepat LSI dengan 100% sampel, data golput pada Pilpres 2019 mencapai 19,24%. Angka tersebut melawan tren golput yang terus naik sejak pemilihan umum pascareformasi. Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU), tingkat golput 23,30% pada Pilpres 2004, 27,45% pada 2009, dan 30,42% pada 2014. Data golput dalam sigi LSI diperoleh dari 100% dikurangi tingkat partisipasi pemilih atau voters turnout di pilpres berdasarkan hitung cepat, yaitu 80,76%.

1. Suara kelompok minoritas

Peneliti LSI, Adrian Sopa, menjelaskan bahwa salah satu faktor yang membantu meningkatkan partisipasi pemilih ialah mobilisasi para pendukung yang semakin gencar di akhir masa kampanye, yang mana kedua pasangan calon menekankan bahwa satu suara bisa membuat perbedaan. Faktor lainnya ialah meningkatnya partisipasi kelompok minoritas non-Muslim akibat gerakan 212. Gerakan ini gencar menyuarakan kepada kaum Muslim agar tidak memilih pemimpin non-Muslim dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017, dan berada di balik upaya yang berhasil memenjarakan Basuki Tjahaja Purnama, yang saat itu menjabat gubernur DKI Jakarta, atas dakwaan penistaan agama.

Pada periode pemilu kali ini, mayoritas simpatisan gerakan tersebut mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. "Terlihat di dukungan yang ada minoritas ini ke Jokowi, tetapi di PA 212 atau FPI lebih terhadap Prabowo sehingga kekhawatiran dari mereka, kalau misalnya mereka pergi tanpa nyoblos dulu nanti kelompok 212 yang akan memenangkan pertarungan ini," kata Adrian.



Peneliti LSI Adrian Sopa mengatakan suara dari kelompok minoritas non-Muslim secara signifikan mengurangi jumlah golput.

Pengaruh suara dari kelompok minoritas ini, menurut Adrian, signifikan mengingat basis mereka sekitar 10%; sementara selisih perolehan suara Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga diperkirakan sekitar 11% atau 17 juta suara. Terlebih, ketika kita lihat data yang ada, hampir 80% kelompok minoritas ini dukungannya ke Jokowi, sehingga kalau mereka tidak datang (ke TPS) suara terhadap Jokowi akan tergerus. Memang tidak sampai mengalahkan Jokowi, tapi akan membuat selisihnya menjadi sangat tipis. Hasil sigi LSI menunjukkan Jokowi-Ma'ruf menang telak di basis suara kelompok minoritas non-Muslim yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Barat. Sementara Prabowo-Sandiaga menang telak di basis suara pemilih Muslim: Jawa Barat, Banten, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Aceh, dan Riau.

2. Angka golput di pileg lebih besar

Hitung cepat LSI menemukan jumlah golput di pemilihan legislatif (pileg) jumlahnya lebih besar dari pilpres, yaitu 29,68%. Adrian Sopa menyebut ini sebagai akibat pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang diadakan serentak. Menurut Adrian, masyarakat menganggap pilpres lebih penting, dan tidak terlalu memperhatikan siapa caleg yang bersaing. "Termasuk porsi peliputan media juga tidak terlalu banyak terhadap pileg, kemudian orang juga tidak terlalu mengenal calon-calonnya," imbuh Adrian.

3. Di hadapan kampanye golput

Angka golput menurun di hadapan gerakan yang mengajak masyarakat untuk tidak memilih pada pemilu kali ini.

Golput bisa dilacak sampai era orde baru, dan gerakan ini selalu ada di setiap periode pemilu, tapi belakangan gaungnya semakin besar berkat perkembangan teknologi. Di dunia maya, ajakan untuk golput menyebar salah satunya dengan tagar #SayaGolput.

Salah satu pegiat gerakan tersebut, Lini Zurlia, mengampanyekan untuk tidak memilih kedua pasangan calon presiden-wakil presiden serta calon anggota legislatif "yang berasal dari partai oligarki".



| Jumlah golput di pemilihan legislatif (pileg) jumlahnya lebih besar dari pilpres,

Lini yang pada periode Pilpres 2014 merupakan pendukung Jokowi, kali ini ia memutuskan untuk golput setelah melihat Jokowi menggandeng Ma'ruf Amin, yang menurutnya memiliki rekam jejak intoleran. Di sisi lain, Prabowo dianggap bukan pilihan karena rekam jejaknya di kasus pelanggaran HAM. Namun Lini mengatakan bahwa menurunnya angka golput berarti kampanye yang ia lakukan gagal karena golput sejatinya juga berarti suara yang tidak sah. Ia menyoroti bahwa beberapa hitung cepat menemukan jumlah suara yang tidak sah mencapai sekitar 2% — hampir mencapai perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Di hari pemungutan suara, ia sendiri datang ke TPS, menempelkan stiker golput di surat suara, mencelupkan jarinya ke tinta biru, dan mengunggah fotonya di media sosial "Ada banyak warga negara yang secara sadar berpartisipasi di tanggal 17 April itu, datang ke TPS dan merusak surat suara. Bagi kami, yang mengampanyekan golput sebagai sebuah pilihan selain (pasangan calon presiden-wakil presiden) 01 dan 02, itu adalah sebuah keberhasilan," kata Lini. Lini juga menekankan bahwa tingkat golput di pileg kali ini hampir 30%, meningkat 6% dari pileg 2014.

"Mungkin saja karena kampanye kami berhasil, menyampaikan kepada publik bahwa partai ini semuanya oligarch, enggak ada yang punya kepentingan terhadap rakyat," ujarnya. Peneliti LSI Adrian Sopa mengatakan, gerakan di akar rumput cukup efektif

dalam menangkalkan kampanye golput di media sosial. "Kalau kampanye golput di media sosial itu sudah ada tandingannya — kampanye anti-golput di media sosial; tetapi untuk kampanye anti-golput di bawah, di grass root itu tidak ada tandingannya," ujar Adrian.

2.8 Mereka yang berjuang untuk bisa mencoblos saat pemilu: 'Memilih adalah hak istimewa'



Bagi Paola memilih bukan hanya masalah identitas, namun juga kesempatan untuk berkontribusi bagi Indonesia.

Di antara antrean panjang warga Indonesia di depan KBRI Singapura pada Minggu (14/04) pagi, Paola Cortese mendapati dirinya tersenyum bangga. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, perempuan berusia 35 tahun itu dapat mencelupkan tinta ungu ke jarinya sebagai bukti sudah berpartisipasi dalam pemilihan umum Indonesia. Paola lahir berkewarganegaraan Italia, mengikuti kebangsaaan ayahnya. Namun, baginya rumah adalah Indonesia, tempat dia lahir dan dibesarkan. Setelah proses yang sangat panjang, dia berhasil mengganti kewarganegaraannya menjadi WNI pada tiga tahun yang lalu.

"Setelah umur 18 boleh memilih apakah mau masuk warga negara Indonesia atau tetap sebagai orang asing. Tapi waktu itu aku kuliah di luar negeri, kerja di luar negeri, baru sampai Indonesia sekitar umur 26. Dan pada saat itu KITAP-ku sudah habis, jadi harus mulai lagi dari visa turis, ke KITAS dan KITAP," ungkap Paola kepada BBC News Indonesia. "Hidupku itu penuh dengan birokrasi. Mengurus dokumen setelah dokumen setelah dokumen karena aku masih dianggap orang asing." Mengikuti pemilu kali ini di Singapura, Paola merasa sah menjadi warga negara Indonesia. "Akhirnya tidak bisa orang lain memungkirinya lagi kalau aku orang Indonesia. Aku bisa memilih." "Sebelum itu seperti ada banyak rasa takut kalau suatu saat aku tidak diterima lagi di Indonesia," papar Paola.

Namun bukan hanya masalah identitas sebagai warga Indonesia yang membuatnya semangat untuk ikut memilih

Menurutnya ada banyak kesempatan yang hilang untuk ikut berkontribusi terhadap Indonesia akibat tidak memiliki hak memilih. "Seperti (pemilu) kemarin, rasanya ingin sekali menyuarakan pendapat. Waktu pilkada Jakarta juga ingin sekali nyoblos gubernur yang aku dukung cuma tidak ada kesempatan."



AYA DUHITA

Meski harus mengeluarkan biaya jutaan rupiah untuk terbang kembali ke Jogjakarta, Aya Duhita meyakini itu adalah upaya yang "tidak memikirkan diri sendiri" dan ikut "menentukan nasib negara".

Upaya yang "tidak memikirkan diri sendiri" Aya Duhita (28), juga menyadari bahwa memilih adalah hak istimewa yang bisa disepelekan. Demi bisa memilih, Aya akan terbang dari Jakarta ke kota asalnya, Yogyakarta, dan mengambil cuti kerja. Meski harus mengeluarkan biaya jutaan rupiah untuk itu, Aya meyakini itu adalah upaya yang "tidak memikirkan diri sendiri" dan ikut "menentukan nasib negara". "Kalau misalnya hak pilih aku tak aku gunakan, itu sama saja seperti aku tidak memikirkan infrastruktur yang sudah jalan. Sekarang kan ada proyek-proyek yang belum 100%.

"Kebijakan apapun yang nanti akan dilaksanakan capres dan cawapres terpilih itu akan menentukan juga akan dilanjutkan atau ditinggal begitu saja, atau dilanjutkan tapi tidak sesuai dengan rencana awal," tuturnya. "Harus dipergunakan sebaik-baiknya" Pada saat bersamaan, ada kelompok yang yakin untuk tidak memilih atau golput di pemilu Rabu (17/04) nanti. Mereka yang memilih untuk golput ini menyatakan kecewa atas dua calon presiden yang ada, tren yang menurut lembaga survei kemungkinan naik pada pemilihan April.

Pada pemilu 2014 lalu, sekitar 30% pemilih tidak berpartisipasi alias golput. Golput adalah salah satu bentuk ekspresi politik dan merupakan hak warga negara, namun Paola Cortese menyayangkan jika ada teman-temannya yang memutuskan untuk golput. "Duh kalian tak tahu yah perjuangannya," ujarnya, "Ada suatu hak penting tapi kok disia-siakan sedangkan aku yang ingin sekali tapi tak bisa waktu itu." "Memilih itu suatu hak istimewa. Tak semua orang yang cinta Indonesia bisa memilih. Contohnya aku. Baru sekarang ada kesempatan untuk memilih dan aku merasa harus dipergunakan sebaik-baiknya," tambahnya.

2.9 Kata Pemantau Asing soal Pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia



Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) melakukan peninjauan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Pemantauan tersebut dilakukan bersama perwakilan luar negeri, pengamat, media, dan unsur TNI. Sejumlah perwakilan negara asing mengaku takjub akan pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Salah satunya diungkapkan oleh Seung Ryeol Kim, perwakilan dari Korea Selatan. "Dari pengamatan saya, semua hal berjalan baik, enggak ada kekerasan, enggak ada konflik. Semua lancar saja dan senang melihatnya," ujar Seung saat meninjau penghitungan suara di TPS 10 Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Rabu (17/4/2019). Ia mengatakan, banyak perbedaan mengenai cara pemilihan umum di Indonesia jika dibandingkan dengan di negaranya. Ia menilai Pemilu di Indonesia memiliki tingkat transparansi yang tinggi. Hal senada disampaikan oleh perwakilan dari Myanmar, U Hla Tein. "Menurut saya sangat transparan dan asumsi saya pemilu di Indonesia itu kredibel. Ada beda sistem di Indonesia dan Myanmar. Di sini 1 pemilu untuk beberapa parlemen.

Di Myanmar beda hari untuk setiap parlemen," paparnya. Baca juga: Quick Count Kompas Data 70 Persen: Jokowi-Maruf 54,24 Persen, Prabowo-Sandiaga 45,76 Persen Inspektur KPU RI Adiwijaya Bakti mengatakan, pemantauan ini dilakukan demi transparansi Pemilu Indonesia di mata dunia. "Ini adalah kegiatan Elektoral Fisik Program, yaitu membuka kepada internasional dan pengamat luar negeri mengenai bagaimana proses pelaksanaan pemilu di Indonesia. Jadi di sini pesertanya ada yang dari Myanmar, Usbek, Jepang, Mozambik, Kedutaan Besar Singapura, Kedutaan Besar Ethiopia, kemudian medianya dari media mesir, kairo, TNI dari pengamat lokal ada dari Undip, IFES, ITB, ICW, IDEA," paparnya. Tak hanya di TPS 10, lanjutnya, pemantauan juga dilakukan di Panti Bina Karya dan TPU dekan

permukiman padat penduduk. "Tadi peserta dari Mesir juga sangat surprise misalnya gimana kita menangani orang-orang penyandang sosial mental yang di negara mereka belum sebgus kita. Setiap lima tahun sekali kita bikin seperti ini termasuk Pilkada juga," pungkasnya.

2.10 Pemilu 2019, Ini 5 Hal Unik yang Ada di Sejumlah TPS di Indonesia, Termasuk TPS Bertema Superhero

Pemilu 2019 sekaligus Pilpres 2019 telah digelar Rabu (17/4/2019) hari ini. Hasil penghitungan cepat alias quick count pun terus bergulir untuk menggambarkan perolehan suara yang didapat pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 dan 02. Selama Pemilu dan Pilpres 2019, ada beberapa hal dan kejadian unik yang terjadi di sejumlah daerah dan TPS di seluruh Indonesia.

1. TPS Mewah mirip Resepsi Pernikahan.



Di Sulawesi Selatan, terdapat satu TPS mewah yang menjadi viral karena dihias seperti lokasi resepsi pernikahan, mengutip laman Grid ID. TPS mewah dihias dengan dekorasi rangkaian bunga berwarna merah dan putih, lengkap dengan meja penerima tamu untuk menyambut para pemilih. Kedua warna tersebut sengaja dipilih karena melambangkan bangsa Indonesia. Viralnya TPS mewah ini berawal dari postingan di Instagram Makassar Info (makassar_iinfo) pada Selasa (16/4/2019). TPS yang kini tengah viral tersebut ternyata adalah TPS 03, Desa Bungi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Para petugas KPPS setempat di TPS tersebut menggunakan baju khas Bugis saat melayani para pemilih. Pria memakai jas tutu, sedangkan perempuannya akan mengenakan baju bodo.

2. TPS tempat Joko Widodo Mencoblos Dihiasi Ondel-ondel.



Dua ondel-ondel menghiasai pintu masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS), lokasi calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019. Jokowi dan istrinya Iriana Joko Widodo (Jokowi) akan mencoblos di TPS 008 yang berlokasi di halaman Lembaga Administrasi Negara, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Dua ondel-ondel tersebut berwarna orange dan merah berdiri di pintu masuk TPS, sebagai tanda ucapan selamat datang. Ondel-ondel ini pun mencirikan budaya khas Jakarta. Sementara TPS sendiri dibangun menggunakan tenda berukuran panjang 10 meter dan lebar 15 meter, dibalut dengan kain berwarna merah putih. Sedangkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terlihat menggunakan batik motif ondel-ondel dan kebaya encim.

3. TPS Sandiaga Uno Bernuansa Wayang.



Nuansa pewayangan kental terasa di TPS (tempat pemungutan suara) 02 Kelurahan Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari pemungutan suara, Rabu (17/4/2019), mengutip laman [Tribunnews.com](http://tribunnews.com). Di TPS itu cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno bersama keluarga melakukan pencoblosan. TPS yang berlokasi di Jalan Sriwijaya itu dinaungi tenda berwarna merah dan putih. Latar belakang khas

pewayangan yang berukuran sedang dipajang di dalam TPS yang menjadi latar belakang empat bilik suara yang disediakan. Di depan 'background' pewayangan itu pun tergantung sejumlah tokoh wayang kulit dalam cerita Perang Mahabharata hingga lakon Semar, Gareng, Petruk, serta Bagong Di TPS itu cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno bersama keluarga melakukan pencoblosan. TPS yang berlokasi di Jalan Sriwijaya itu dinaungi tenda berwarna merah dan putih. Latar belakang khas pewayangan yang berukuran sedang dipajang di dalam TPS yang menjadi latar belakang empat bilik suara yang disediakan. Di depan 'background' pewayangan itu pun tergantung sejumlah tokoh wayang kulit dalam cerita Perang Mahabharata hingga lakon Semar, Gareng, Petruk, serta Bagong

4. Penghitungan Surat Suara Dipindah ke Mushala Akibat Hujan Deras.



Hujan deras yang mengguyur wilayah Desa Darek, Kecamatan Praya Daaya, Lombok Tengah, sekitar pukul 16.00 WITA, membuat penghitungan suara di TPS 15 Desa Darek harus pindah lokasi ke mushala, mengutip laman Kompas.com.

Menurut Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Nursalim, pemindahan lokasi TPS ke mushala terjadi karena dikhawatirkan hujan deras yang terjadi akan merusak surat suara. Menurutnya, mushala merupakan tempat yang terbuka, jadi bisa langsung dilihat oleh masyarakat umum. Ia juga menyebutkan pihaknya telah berkoordinasi dengan pengawas pemilu kecamatan. Sampai pukul 19.00 WITA penghitungan surat suara di TPS 15 Desa Darek, masih menghitung suara untuk DPR D Kabupaten.

5. TPS Bertema Superhero di Surabaya.



Di TPS 05, kompleks Perumahan Pondok Benowo Indah, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Surabaya, semua anggota KPPS menggunakan atribut Superhero. Ada Batman, Superman, Capten America, hingga Spiderman. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian pemilih agar datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), mengutip laman Kompas.com. Tidak hanya pemilih dewasa yang penasaran datang ke TPS tersebut, tapi anak-anak terpantau juga meramaikan TPS karena ingin melihat karakter Superhero. Iriandi, Ketua KPPS TPS 05, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, mengatakan, atribut yang dikenakan anggota KPPS ternyata terbukti bisa menarik pemilih. "Hingga pukul 12 siang sudah 206 yang mencoblos, dari total 261 daftar pemilih yang tercatat. Syukur sudah 80 persen yang datang. Ini cukup efektif," katanya.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pemilu 2019 di Indonesia adalah momen bersejarah yang penuh tantangan dan harapan. Berdasarkan ulasan artikel-artikel yang telah kami bahas, beberapa kesimpulan penting dapat ditarik:

1. Inklusi Pemilih Penyandang Disabilitas Mental: Upaya KPU untuk memasukkan pemilih penyandang disabilitas mental dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah langkah positif menuju inklusi sosial yang lebih baik. Artikel-artikel yang kami ulas menunjukkan bahwa langkah ini mendapat respons positif dari masyarakat.
2. Respon Warganet: Artikel yang membahas respons positif dan negatif warganet terhadap debat pertama kandidat mencerminkan betapa kuatnya pengaruh media sosial dalam proses politik. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengelola informasi dan diskusi di ruang digital agar berkontribusi pada debat yang konstruktif.
3. Alur Penghitungan: Suara dan Pelaksanaan yang Tertib: Artikel-artikel yang menggambarkan alur waktu penghitungan suara dan pelaksanaan pemilu yang tertib dan damai di Lapas Narkotika Jakarta menunjukkan pentingnya administrasi yang baik dalam menjaga integritas pemilu.
4. Partisipasi Masyarakat dengan Gangguan Jiwa: Artikel yang menyoroti pesta demokrasi yang sama bagi mereka dengan gangguan jiwa memberikan perspektif bahwa hak memilih harus diakses oleh semua warga negara tanpa diskriminasi. Ini adalah langkah positif menuju inklusi yang lebih luas.
5. Jumlah Golput yang Rendah: Artikel yang menyatakan bahwa jumlah golput pada Pemilu 2019 mencapai level terendah sejak 2004 adalah bukti antusiasme masyarakat Indonesia dalam menggunakan hak pilih mereka.
6. Peran Pemantau Asing: Perspektif pemantau asing dalam artikel-artikel yang kami ulas memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana Pemilu 2019 di Indonesia dilihat dari sudut pandang internasional.
7. Uniknya Pemilu 2019: Artikel yang mengulas keunikan-keunikan di tempat pemungutan suara, termasuk TPS bertema superhero, mencerminkan semangat kreatif dan meriah dalam berpartisipasi dalam pemilu.

3.2 Saran

Berangkat dari kesimpulan-kesimpulan di atas, kami mengusulkan beberapa saran yang dapat menjadi panduan untuk membuat Pemilu 2024 semakin meriah, unik, dan terhindar dari perpecahan:

1. Inklusi Pemilih Penyandang Disabilitas Mental: KPU dan pemangku kepentingan terkait harus terus mengembangkan dan menerapkan kebijakan inklusi pemilih penyandang disabilitas mental. Dibutuhkan pendekatan yang lebih luas dalam memberikan dukungan dan fasilitas agar mereka dapat berpartisipasi dengan lebih baik.
2. Manajemen Media Sosial: Partai politik, kandidat, dan badan pemilihan harus berperan aktif dalam mengelola informasi di media sosial agar memberikan kontribusi positif dalam debat politik. Kampanye negatif dan disinformasi harus dikendalikan dengan ketat.
3. Transparansi Alur Penghitungan Suara: Keterbukaan dan transparansi dalam alur penghitungan suara adalah kunci untuk menjaga integritas pemilu. Pengawasan publik harus didorong, dan proses perhitungan harus dijelaskan dengan lebih mudah dimengerti.
4. Akses untuk Masyarakat dengan Gangguan Jiwa: Penyelenggara pemilu perlu bekerja sama dengan lembaga dan organisasi yang peduli dengan kesejahteraan masyarakat dengan gangguan jiwa. Program-program pendidikan pemilih khusus dan fasilitas yang lebih baik perlu disediakan.
5. Pendidikan Pemilih: Pendidikan pemilih yang intensif dan lebih luas harus menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dan pemahaman tentang demokrasi.
6. Kerja Sama Internasional: Kerja sama dengan lembaga pemantau internasional perlu ditingkatkan untuk memastikan pemilu di Indonesia memenuhi standar global. Dengan demikian, hasil pemilu akan lebih dihormati dan diakui secara internasional.
7. Kreativitas dan Partisipasi Aktif: Masyarakat dan pemangku kepentingan harus didorong untuk mengekspresikan kreativitas mereka dalam proses pemilu. Menyelenggarakan TPS bertema atau inisiatif-inisiatif serupa dapat memicu semangat berpartisipasi yang lebih besar.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan Pemilu 2024 akan menjadi pesta demokrasi yang semakin meriah, unik, dan lebih inklusif, serta membantu mengurangi perpecahan dalam masyarakat. Pemilu bukan hanya sebuah acara politik, tetapi juga ekspresi kolektif dari kehendak rakyat, dan kami yakin bahwa langkah-langkah ini dapat membantu meningkatkan kualitas proses demokrasi di Indonesia.

DAFTAR FUSTAKA

1. <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/18/12144821/respons-positif-dan-negatif-warganet-saat-debat-pertama-versi-politicawave>
2. <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/24/10321201/6-hal-menarik-selama-sidang-sengketa-hasil-pilpres-di-mk?page=all>
3. <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/13/21334381/kpu-akan-masukkan-pemilih-penyandang-disabilitas-mental-ke-dpt-pemilu-2019>
4. <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/18/14405981/begini-alur-waktu-penghitungan-dan-rekapitulasi-suara-pemilu-2019>
5. <https://jakarta.kemenkumham.go.id/arsip-berita-upt/lapas-narkotika-jakarta/pelaksanaan-pemilu-2019-berjalan-tertib-dan-damai-di-lapas-narkotika-jakarta>
6. <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/10/09454971/pesta-demokrasi-yang-sama-bagi-mereka-dengan-gangguan-jiwa?page=all>
7. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48130161>
8. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47932744>
9. <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/17/17185741/kata-pemantau-asing-soal-pelaksanaan-pemilu-2019-di-indonesia>
10. <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/17/pemilu-2019-ini-5-hal-unik-yang-ada-di-sejumlah-tps-di-indonesia-termasuk-tps-bertema-superhero>